

Upaya Pemerintah Dalam Mengembangkan UMKM Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Kota Mataram

Arya Akbar¹, Ahmad Arya Bagus², Inka Nusamuda Pratama³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Mataram

Arya94725@gmail.com¹, aryaahmadbagus@gmail.com², inka.nusamuda@ummat.ac.id³

Keywords:

MSMEs¹,
Poverty²,
Government Efforts³,
Public Policy⁴.

Abstract: Poverty remains a serious challenge in Indonesia, including in Kota Mataram, West Nusa Tenggara. This study investigates the government's efforts to develop Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as a strategy to reduce poverty levels in Kota Mataram. Through literature review, we analyze the policies and programs for MSME empowerment as well as their barriers and impacts. The findings indicate that despite a temporary decrease in poverty levels, challenges such as limited resources, lack of training, and difficulties in accessing financing still hinder MSME development. However, programs like the People's Business Credit (KUR) have had a positive impact in fostering MSME growth and reducing poverty. Joint efforts between the government, community, and private sector are needed to strengthen MSME empowerment through enhanced human resources, easier access to financing, and improved coordination.

Kata Kunci:

UMKM¹,
Kemiskinan²,
Upaya Pemerintah³,
Kebijakan Publik⁴.

Abstrak: Kemiskinan tetap menjadi tantangan yang serius di Indonesia, termasuk di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menyelidiki upaya pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai strategi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Mataram. Melalui studi pustaka, kami menganalisis kebijakan dan program-program pemberdayaan UMKM serta hambatan dan dampaknya. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan sementara dalam tingkat kemiskinan, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, dan sulitnya akses pembiayaan masih menghambat pengembangan UMKM. Namun, program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan mengurangi kemiskinan. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat pemberdayaan UMKM melalui peningkatan sumber daya manusia, akses pembiayaan yang lebih mudah, dan koordinasi yang lebih baik.

Article History:

Received: 30-05-2024

Online : 22-06-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial dan ekonomi yang mendalam dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki sumber daya alam

dan sumber daya manusia yang cukup untuk mencapai kemakmuran, sejumlah faktor yang kompleks terus menghambat kemajuan tersebut (Pratama, 2023). Secara umum, kemiskinan adalah masalah sosial yang terus-menerus perlu diteliti. Ini karena kemiskinan telah ada sejak lama dan masih ada di sekitar kita, dan gejalanya semakin meningkat seiring dengan krisis berbagai dimensi yang masih dihadapi oleh negara Indonesia. Meskipun kemiskinan terjadi pada setiap orang atau individu, itu tidak berarti bahwa itu hanya tanggung jawab individu; sebaliknya, seluruh bangsa atau stakeholder harus berusaha untuk mengatasi masalah ini (Fardi et al., 2023).

Kemiskinan adalah masalah yang sangat penting bagi Indonesia. Terlepas dari penurunan drastis tingkat kemiskinan selama beberapa dekade terakhir, jutaan orang terus hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22%, atau sekitar 24,79 juta orang, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada Maret 2021, menurun dari 9,78% pada September 2020. Namun, meskipun penurunan ini, tingkat kemiskinan tetap tinggi dan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Banyak faktor yang berkontribusi pada kemiskinan di Indonesia, termasuk kesenjangan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, keterbatasan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang baik, dan masalah ketimpangan sosial dan geografis. Program bantuan sosial dan pengembangan ekonomi adalah beberapa upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan. Meskipun demikian, upaya yang lebih besar dan terkoordinasi masih diperlukan untuk memecahkan masalah kemiskinan dasar di Indonesia (Ibrahim & Pratama, 2024).

Untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan penyerapan lapangan kerja, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan kebijakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program ini dijalankan dalam berbagai format dan kegiatan, baik khusus maupun umum. Dengan kata lain, akan mencakup semua aktivitas ekonomi yang dilakukan secara nasional atau yang diawasi secara langsung oleh Mataram dari tahun 2014 hingga 2018. Secara khusus, akan mencakup semua aktivitas mikro yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Suryati & Salkiah, 2019).

Pemerintah telah memilih untuk mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Karena peran strategis UMKM dan kemampuan mereka untuk berkembang, pengembangan usaha kecil saat ini merupakan salah satu pendekatan yang dipilih pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kurangnya akses ke informasi, terutama informasi pasar, adalah masalah yang dihadapi oleh UMKM. Hal ini menyebabkan orientasi pasar yang buruk dan daya saing yang rendah (Andiny & Nurjannah, 2018).

Dalam beberapa dekade terakhir, kota Mataram di Pulau Lombok, Indonesia, telah menjadi pusat ekonomi yang berkembang pesat. Tingkat kemiskinan kota tetap tinggi meskipun kemajuan ini terjadi. Data kemiskinan Kota Mataram menunjukkan bahwa ada tantangan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di kota ini. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan mencapai 8,92% dari total penduduk, atau 43.190 orang. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 41.800 jiwa, atau 8,47% dari total penduduk, yang mungkin merupakan hasil dari upaya pemberdayaan ekonomi atau kebijakan yang berhasil diterapkan pada tahun tersebut. Sayangnya, pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin meningkat lagi

menjadi 44.450 jiwa, atau 9,13% dari total penduduk, dan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin meningkat lagi menjadi 45.300 jiwa, atau 9,13% dari total penduduk (Pratama, 2023).

Tabel 1. Perkembangan Presentase penduduk miskin kota Mataram Tahun 2014 - 2023

No.	Tahun Data	Presentase
1.	2014-12-31	10,53%
2.	2015-12-31	10,45%
3.	2016-12-31	9,8%
4.	2017-12-31	9,55%
5.	2018-12-31	8,96%
6.	2019-12-31	8,92%
7.	2020-12-31	8,47%
8.	2021-12-31	9,13%
9.	2022-12-31	9,16%
10.	2023-12-31	9,19%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram Tahun 2023

Mataram adalah pusat pemerintahan Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan banyak bisnis. Pemberdayaan UMKM adalah salah satu jenis usaha yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat dengan modal yang relatif kecil, yang merupakan jenis usaha skala sangat kecil. Pemerintahan UMKM ini memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menyerap lapangan kerja, terutama di masyarakat lapisan bawah. Pemberdayaan UMKM adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Ini sangat berpotensi untuk meningkatkan penghasilan dan menambah dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada gilirannya, kesejahteraan keluarga dapat meningkat (Daeng Akung et al., 2023).

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dengan PP No. 13 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 maka pemerintah membuat kebijakan mengenai program-program pemberdayaan UMKM. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM adalah pemerintah memberikan izin usaha bagi para pelaku usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing usaha, adanya koordinasi dan pengendalian dari pemerintah (Wilfarda et al., 2021).

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap “UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN UMKM UNTUK MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MATARAM” guna menggambarkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Mataram, serta mengidentifikasi hambatan dan dampak dari pengembangan UMKM di Kota Mataram.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang juga dikenal sebagai library research. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori serta temuan-temuan dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui pencarian sumber-sumber seperti buku, jurnal, riset-riset terdahulu, serta dokumen-dokumen terkait kebijakan pemerintah dan

program-program pengembangan UMKM di Kota Mataram (Adlini et al., 2022). Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam guna mendukung proposisi dan gagasan yang diajukan dalam penelitian ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Mataram.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan UMKM. Karena perannya yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, pengembangan UMKM sangat penting. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur kebijakan ini. Undang-undang tersebut mendefinisikan pengembangan sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka dengan menyediakan fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan. Dengan mempertimbangkan sifat-sifat usaha mikro, kecil, dan menengah Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah daerah sangat penting karena mereka seharusnya lebih memahami kondisi daerahnya. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) dilakukan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang Makmur (Sucahyo et al., 2023).

Sebagai hasil dari intervensi dan pendekatan yang sistematis, integral, dan komprehensif yang dilakukan oleh Pemkot Mataram, angka kemiskinan di Kota Mataram telah turun sebesar satu digit dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Ini turun dari 9,8% pada tahun 2016 menjadi 8,65% pada tahun 2021. Dalam sambutannya pada rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diadakan di Hotel Lombok Raya pada Selasa, 6 Juni 2023, Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman menyatakan hal ini.

Upaya Pemerintah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Kota Mataram

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kota Mataram telah turun sebesar satu digit berkat intervensi dan pendekatan yang sistematis, integral, dan komprehensif yang dilakukan oleh Pemkot Mataram. Pada tahun 2021, ini turun menjadi 8,65% dari 9,8% pada tahun 2016. Ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman saat menyambut rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Lombok Raya pada Selasa, 6 Juni 2023. Namun naik Kembali pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 9, sekian %, oleh karena itu perlu komitmen pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan pengembangan UMKM.

Salah satu upaya pemerintah agar UMKM bisa berkembang dengan cara Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program kredit yang diperuntukkan bagi UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja, dengan adanya hal tersebut dapat membantu pelaku usaha untuk meminjam modal usahanya agar usaha tersebut dapat berkembang. Pengembangan usaha salah satunya karena faktor permodalan yang masih sulit menjangkau pelaku UMKM (Anggraeni, 2019). Pengembangan UMKM dan pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah kota Mataram termasuk memberikan modal usaha kepada pelaku usaha kecil. Hal ini disebabkan oleh fakta

bahwa tingkat kepatuhan untuk mengembalikan modal usaha kepada pihak perbankan lebih tinggi dan bunga yang diterapkan juga lebih tinggi, sehingga pelaku usaha enggan untuk meminjam modal dari lembaga perbankan karena mereka khawatir akan gulung tikar karena bunga yang diterapkan tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan tidak hanya peran pemerintah saja tetapi juga dibutuhkan peran dari masyarakat dan perusahaan besar. Peran masyarakat bisa ditunjukkan dengan menjadi tenaga kerja atau permodalan bagi perkembangan UMKM. Sedangkan peran perusahaan besar dapat berupa pembinaan dan bantuan dana, pembinaan bisa dilakukan dengan mengundang UMKM untuk mengadakan pameran atau seminar mengenai UMKM yang bertema inovasi produk untuk mengembangkan usaha, sedangkan bantuan dana sangat diperlukan dalam UMKM karena modal yang diterima UMKM belum sebanding dengan usaha yang mereka jalankan, agar UMKM bisa berjalan dengan baik agar UMKM dapat berkembang di kota Mataram ini.

Dalam kegiatan UMKM saat ini diharapkan pelaku usaha menjadi lebih kreatifitas agar produk yang dimiliki bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia maupun di pasar ASEAN. Hal tersebut bisa melewati beberapa hal yaitu :

1. Desain dan Penggunaan Merk Produk Pemasaran, merupakan masalah awal yang biasanya dimiliki oleh UMKM, terkait persaingan pasar dan produk. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan diharapkan menjadi solusi atas masalah yang dialami oleh pelaku usaha, salah satunya dengan menggunakan merk pada produk yang dimiliki oleh pelaku usaha, sehingga merk tersebut dapat dikenal oleh konsumen dan akhirnya bisa bersaing di pasar. Setelah hal tersebut dilakukan maka, merk produk akan ditempelkan di kemasan produk yang dimiliki oleh pelaku usaha.
2. Pembukaan Keuangan Sederhana, UMKM tersebut akan diberikan edukasi dalam penerapan keuangan sederhana di usahanya. Karena dalam hal ini bisa meliputi pencatatan transaksi keuangan baik pengeluaran maupun penerimaan, dengan tujuan agar pelaku usaha lebih memahami pengeluaran dan penerimaan yang dihasilkan setiap bulannya. Dan bisa memudahkan pelaku usaha dalam mengelola keuangan.
3. Inovasi Produk UMKM yang ada di kota Mataram ini harus diberikan sosialisasi melalui peningkatan keterampilan dalam melakukan inovasi agar pelaku umkm bisa lebih berinovasi terhadap produk yang akan dipasarkan

Hambatan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Mataram

Hambatan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram dapat ditemukan dalam beberapa aspek hambatan yang diidentifikasi dalam beberapa sumber antara lain yaitu; (1) Sumber Daya Terbatas: Studi Rina, (2021) berjudul "Strategi Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Dalam Pemberdayaan UMKM Berbasis Sentra Pada Pengrajin Mutiara, Emas, dan Perak Di Sekarbela Kota Mataram" menemukan bahwa UMKM di Kota Mataram mengalami hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, modal, dan lainnya. Sumber daya yang terbatas dapat menjadi salah satu hambatan yang paling signifikan dalam mendorong UMKM untuk berkembang, (2) Wawancara dengan pelaku UMKM di Kota Mataram mengungkapkan bahwa mereka masih jarang menerima pelatihan, terutama dari daerah. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga mereka

tidak dapat mengembangkan bisnis mereka dengan baik (Mohadi & Aminy, 2023), (3) Kurangnya Kemudahan Akses Pembiayaan, seperti dalam (Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah, 2016), dikemukakan bahwa UMKM NTB memiliki daya saing yang baik, namun mereka masih mengalami hambatan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Kemudahan akses pembiayaan dapat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemampuan UMKM untuk berkembang, (4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa koordinasi yang terpadu antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak lain diperlukan untuk melaksanakan pemberdayaan UMKM. Kekurangan koordinasi dapat menyebabkan pemberdayaan UMKM menjadi kurang efektif.

Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kota Mataram

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah daerah telah berusaha untuk mengurangi jumlah orang miskin sejak diberlakukan otonomi daerah, terutama desentralisasi fiskal. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan usaha mikro di wilayah tersebut, yang akan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara umum dampak pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dilihat pada adanya perubahan taraf hidup pelaku usaha yang semakin meningkat. Hal ini tercermin melalui adanya penambahan jumlah tenaga kerja, penambahan omzet yang dimiliki oleh pelaku usaha, bertambahnya keuntungan, dan lain sebagainya. Adanya perbaikan taraf kehidupan yang ditandai dengan berkembangnya usaha yang dijalankan sangat dirasakan oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak muda yang juga merasakan manfaatnya.

Program pemberdayaan UMKM seperti dana KUR dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan mengurangi indeks kemiskinan. Seperti yang ditunjukkan oleh jumlah usaha mikro yang mengikuti program KUR, terbukti bahwa program ini memiliki efek positif terhadap pertumbuhan usaha mikro di Kota Mataram. Tujuan implementasi program KUR adalah untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, dan dua komponen penting berperan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro ini: (1) Peran pemerintah daerah dalam mendorong atau mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan memfasilitasi mereka untuk bersosialisasi dan bekerja sama dengan perbankan atau lembaga penyalur KUR dengan memberikan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan; (2) Peran perbankan atau lembaga penyalur KUR dalam memberikan aksesibilitas pinjaman kepada UMKM.

Pengembangan usaha mikro juga membantu memerangi kemiskinan karena tujuan pengembangan usaha mikro adalah untuk mengembangkan, memandirikan, dan memberdayakan para pelaku UMKM sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah konkrit telah

diambil, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program bantuan serta insentif lainnya. Namun, terdapat sejumlah hambatan yang masih menghambat pemberdayaan UMKM, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, sulitnya akses pembiayaan, dan kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan perusahaan besar dalam menyediakan bantuan, pelatihan, serta memperkuat koordinasi untuk memastikan pengembangan UMKM dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam upaya memperkuat pemberdayaan UMKM di Kota Mataram, penting untuk memperhatikan aspek-aspek seperti peningkatan sumber daya manusia, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. Program-program bantuan dan pelatihan perlu diperkuat, sementara akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau perlu diupayakan. Selain itu, kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, diharapkan pemberdayaan UMKM di Kota Mataram dapat semakin berkembang, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan dalam penelitian ini. Kami menghargai upaya para penulis dan peneliti sebelumnya yang telah memberikan landasan pengetahuan yang penting bagi penelitian kami. Tak lupa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan dorongan selama proses penelitian. Baik itu dari rekan peneliti, dosen pembimbing, maupun pihak lain yang turut serta dalam penelitian ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada keluarga dan teman-teman kami yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Doa dan support dari mereka sangatlah berarti bagi kami. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Kami berterima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

REFERENSI

Journal

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Andiny, P., & Nurjannah. (2018). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 31–37.
- Anggraeni, C. D. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Melalui Inovasi Produk. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Daeng Akung, Ihsan Ro'is, Hailuddin, Helmy Fuady, M. A. (2023). Pembinaan Dan Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Gomong Selaparang Kota Mataram. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 3(2), 197–206.
<https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v3i2.455>
- Fardi, M., Inka Nusamuda Pratama, Darmansyah, & Amil. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 3, 150–155.
<https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.209>
- Ibrahim, I., & Pratama, I. N. (2024). Impresi Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh*

(JSPM), 5(1), 1–14.

- Menengah, N. A. R. P. tentang P. dan P. U. M. dan K. dan. (2016). *Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*.
- Mohadi, & Aminy, M. H. (2023). Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan , Manajemen dan Akuntansi Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan , Manajemen dan Akuntansi Vol . 8 No . 2 , September 2022 ISSN 2460-5298 , Dan E-ISSN 2621-. *Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 72–87.
- Pratama, I. N. (2023a). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(2), 261–272. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i2.1314>
- Pratama, I. N. (2023b). *Dinamika Kemiskinan Di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir*. 2(April), 1216–1222.
- RINA, S. (2021). *Strategi Dinas Koperasi Ukm Provinsi Ntb Dalam Pemberdayaan Umkm Berbasis Sentra Pada Pengrajin Mutiara, Emas Dan Perak Di ...*
<https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/3866%0Ahttp://repository.ummat.ac.id/3866/5/Cover - BAB III.pdf>
- Sucahyo, I., Hidayatullah, M. R., Amrullah, M. J., Karimah, Z., Musthofa, A., & Aisyah, S. (2023). Upaya Pemerintah dalam mengembangkan UMKM melalui Program Car Free Day DI Kota Kraksaan. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 99–111.
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.2088>
- Suryati, D., & Salkiah, B. (2019). Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pada Umkm Di Kota Mataram. *Media Bina Ilmiah*, 13(12), 1823.
<https://doi.org/10.33758/mbi.v13i12.266>
- Wilfarda, A. C., Ningtiyas, W. P., & Alimah, N. M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 47–65.